

**LAPORAN THESIS**

**PERLINDUNGAN HUKUM PASIEN  
SIRKUMSISI PADA LAYANAN *HOME CARE***



**AULIA FEBRIANA ROMADHONA  
NIM 21.C2.0108**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM KESEHATAN  
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG**

**2026**

## ABSTRAK

Sirkumsisi merupakan tindakan medis invasif minor yang secara luas dilakukan pada anak, baik atas dasar medis, agama, maupun budaya. Seiring berkembangnya layanan kesehatan berbasis rumah (*home care*), praktik sirkumsisi semakin sering dilakukan di luar fasilitas kesehatan formal. Namun demikian, praktik ini menimbulkan persoalan hukum yang serius, khususnya terkait keselamatan pasien anak dan efektivitas perlindungan hukum yang tersedia. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana pengaturan hukum tindakan sirkumsisi dalam layanan *home care*, bagaimana perlindungan hukum bagi pasien yang mengalami komplikasi, serta bagaimana tanggung jawab hukum tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam praktik tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif kerangka perlindungan hukum pasien sirkumsisi telah tersedia melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta kode etik dan standar profesi medis. Namun, tidak terdapat regulasi teknis yang secara khusus mengatur standar pelaksanaan sirkumsisi berbasis *home care*, sehingga menimbulkan kekosongan norma dan lemahnya perlindungan hukum preventif.

Penelitian ini menemukan bahwa perlindungan hukum terhadap pasien anak dalam praktik sirkumsisi *home care* cenderung bersifat represif dan reaktif, yang baru bekerja setelah terjadinya kerugian melalui mekanisme pidana, perdata, etik, dan disiplin profesi. Lemahnya pengawasan, ketiadaan standar operasional prosedur, rendahnya literasi hukum masyarakat, serta minimnya dokumentasi medis memperburuk posisi hukum pasien anak. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum pasien sirkumsisi pada layanan *home care* di Indonesia masih belum efektif dan memerlukan penguatan regulasi preventif, pengawasan negara, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat untuk menjamin keselamatan dan hak anak sebagai pasien.

**Kata kunci:** perlindungan hukum, sirkumsisi, home care, pasien anak, tanggung jawab hukum

## **ABSTRACT**

*Circumcision is a minor invasive medical procedure commonly performed on children for medical, religious, and cultural reasons. Along with the development of home-based health services (home care), circumcision is increasingly conducted outside formal healthcare facilities. However, this practice raises serious legal concerns, particularly regarding patient safety and the effectiveness of legal protection for child patients. This study aims to analyze the legal regulation of circumcision in home care services, the forms of legal protection available to patients who experience complications, and the legal liability of medical professionals and healthcare providers involved in such practices.*

*This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and case approaches. The study relies on primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed qualitatively through grammatical, systematic, and teleological interpretation.*

*The findings reveal that, normatively, the legal framework for protecting circumcision patients is provided by Law Number 17 of 2023 on Health, Law Number 29 of 2004 on Medical Practice, Law Number 35 of 2014 on Child Protection, Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection, as well as medical ethical codes and professional standards. Nevertheless, there is no specific technical regulation governing circumcision procedures in home care settings, resulting in regulatory gaps and weak preventive legal protection.*

*The study demonstrates that legal protection for child patients in home-based circumcision practices is predominantly repressive and reactive, functioning only after harm has occurred through criminal, civil, ethical, and disciplinary mechanisms. Insufficient state supervision, the absence of standard operating procedures, low legal awareness among the public, and inadequate medical documentation significantly weaken the legal position of child patients. Therefore, this research concludes that legal protection for circumcision patients in home care services in Indonesia remains ineffective and requires stronger preventive regulation, enhanced governmental oversight, and improved public legal awareness to ensure the safety and rights of children as patients.*

**Keywords:** *legal protection, circumcision, home care services, child patients, legal liability.*